



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : (0370) 7856244, Faksimile : 625341
Laman : ntb.kemenkumham.go.id, Email : kanwilntb@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Kamis, 7 Maret 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Laweng, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Bapemperda DPRD KSB
Instansi : Sekwan DPRD Kab. Sumbawa Barat
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : Ignatius M.T. Silalahi, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat
selanjutnya sebagai Perwakilan Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian.

1. Berdasarkan surat Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 100.32/36/DPRD/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal permohonan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang:

- A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- B. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
- C. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
- D. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Karang Taruna;

pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 yang dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan Perwakilan Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa Barat/Perwakilan Pemrakarsa ;

SOMAKER PAK IMI

2. Sesuai hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah, substansi Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

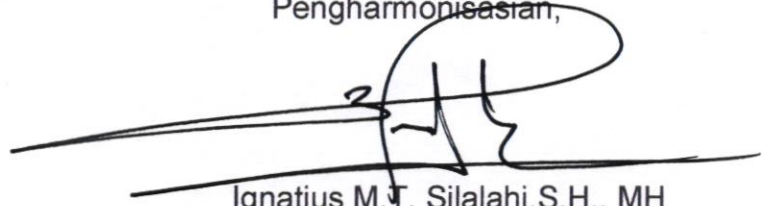
Sumbawa Barat , 7 Maret 2024

Pemrakarsa,



Andi Laweng, SH.,MH.

a.n.Ketua Tim Kelompok Kerja
Pengharmonisasian,



Ignatius M.T. Silalahi, S.H., MH

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat



Pariindungan
NIP. 197007011992031002